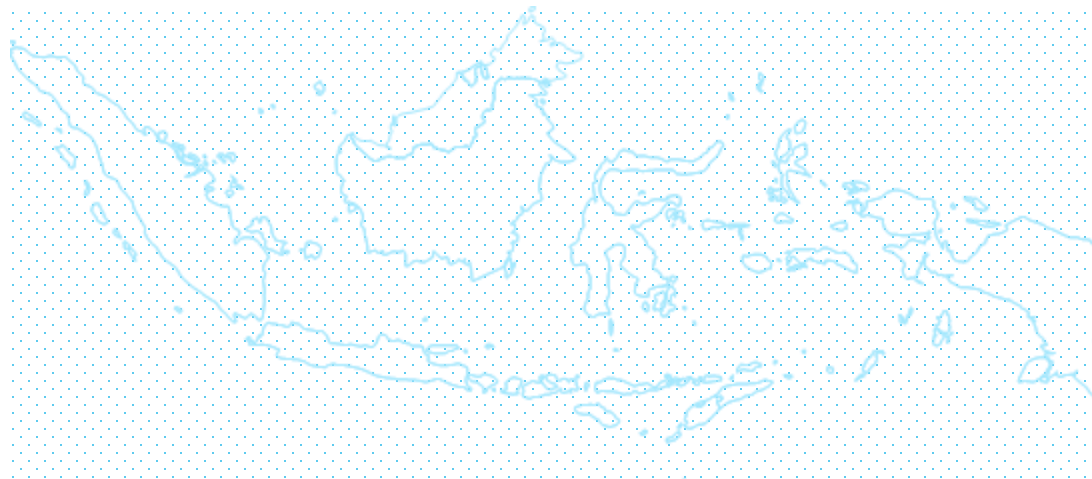




KORUPSI, DEMOKRASI DAN KRISIS LINGKUNGAN



CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2024

Jakarta, 11 Februari 2025

CORRUPTION PERCEPTION INDEX?

Korupsi pada umumnya terdiri dari kegiatan ilegal yang sengaja disembunyikan dan hanya diketahui melalui skandal, investigasi, atau penuntutan oleh penegak hukum.

Keunggulan CPI sebagai indikator tata kelola:

1. Mempunyai cakupan geografis global, dengan 180 negara/teritori
2. Secara rutin dilakukan tiap tahun semenjak 1995.
3. Merupakan komposit dari berbagai indeks yang telah disarikan pada korupsi sektor publik.
3. Dengan skala 0-100, dapat membedakan tingkat persepsi korupsi yang lebih rinci dibandingkan sumber yang, misalnya, mempunyai skala dari 1-7 atau 1-10.
4. Karena sumber-sumber yang mendasari CPI menilai dimensi dan manifestasi korupsi sektor publik, CPI berhasil melakukan rekonsiliasi berbagai aspek korupsi menjadi satu indikator.



Aspek dalam CPI

- Penyuapan
- Pengalihan anggaran publik
- Prevalensi pejabat yang menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi
- Kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan integritas yang efektif
- Keterbatasan birokrasi dan beban birokrasi yang berlebihan yang mungkin menambah peluang terjadinya korupsi
- Penunjukan pejabat publik yang bersifat meritokratis versus nepotis dalam pelayanan publik
- Penuntutan pidana yang efektif terhadap pejabat yang korup
- Undang-undang yang memadai mengenai keterbukaan anggaran dan pencegahan konflik kepentingan pejabat publik
- Perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis, dan penyelidik melaporkan kasus suap dan korupsi
- Akses masyarakat sipil terhadap informasi mengenai urusan publik

Aspek Tidak Diukur di CPI

- Persepsi atau pengalaman warga negara terhadap korupsi
- Penipuan pajak
- Aliran keuangan terlarang
- Pendukung/penggerak korupsi (pengacara, akuntan, penasihat keuangan, dll)
- Pencucian uang
- Korupsi di sektor swasta
- Perekonomian dan pasar informal

METODOLOGI CPI

13
Sumber data
untuk CPI
2023

12

Sumber data
diperbaharui

1

Sumber data tidak
diperbaharui

Sumber data 2024:

- VDEM
- World Justice Project Rule of Law Index
- PRS Group ICRG indicators
- Economist Intelligence Unit
- World Economic Forum EOS
- Freedom House Nations in Transit
- IMD World Competitiveness Yearbook
- PERC Asia Risk Guide
- Global Insights Country Risk Ratings
- World Bank CPIA
- African Development Bank CPIA
- Bertelsmann Transformation Index

Sumber data sama dengan CPI 2023:

- Bertelsmann Sustainable Governance Indicators

METODOLOGI CPI

| No | Sumber | Waktu | N |
|----|--|---------------------|-----|
| 1 | African Development Bank CPIA 2023 | Sep - Nov 2023 | 54 |
| 2 | Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Index 2024 | Jan 2022 - Jan 2024 | 30 |
| 3 | Bertelsmann Foundation Transformation Index 2024 | Jan 2021 - Jan 2023 | 137 |
| 4 | Economist Intelligence Unit Country Ratings 2024 | Sep-24 | 131 |
| 5 | Freedom House Nations in Transit 2024 | Jan - Dec 2023 | 29 |
| 6 | S&P / Global Insights Global Risk Ratings 2023 | Oct - Dec 2023 | 207 |
| 7 | IMD World Competitiveness Yearbook 2024 | Feb - May 2024 | 67 |
| 8 | PERC Asia Risk Guide 2024 | Jan - Mar 2024 | 16 |
| 9 | PRS International Country Risk Guide 2024 | Sep 2023 - Aug 2024 | 141 |
| 10 | Varieties of Democracy Project | Jan - Dec 2023 | 178 |
| 11 | World Bank CPIA 2023 | Jan-Dec 2023 | 74 |
| 12 | World Economic Forum EOS 2024 | Mar - Aug 2024 | 117 |
| 13 | World Justice Project Rule of Law Index 2024 | Feb - June 2024 | 142 |

9

Sumber data untuk CPI 2024

Sumber data 2024:

- VDEM
- World Justice Project Rule of Law Index
- PRS Group ICRG indicators
- Economist Intelligence Unit
- IMD World Competitiveness Yearbook
- PERC Asia Risk Guide
- Global Insights Country Risk Ratings
- Bertelsmann Transformation Index
- World Economic Forum EOS:

Sumber data kembali hadir:

- World Economic Forum EOS: Pada 2022 dan 2023, WEF tidak memasukkan sejumlah negara karena mereka tidak mendapatkan tanggapan yang cukup untuk survei dan karena ada kekhawatiran mengenai kualitas data. Negara-negara yang tidak ikut dalam survei tahun tersebut antara lain: Albania, Benin, Bosnia dan Herzegovina, Barbados, Botswana, Kamboja, Tiongkok, Tanjung Verde, Iran, Israel, Yordania, Laos, Lebanon, Lesotho, Latvia, Moldova, Makedonia Utara, Montenegro, Mongolia, Namibia, Nikaragua, Paraguay, Rusia, Sierra Leone, Slovakia, Tajikistan, Trinidad dan Tobago, dan Zimbabwe; Argentina, Bolivia, Aljazair, Mesir, Indonesia, Jamaika, Pakistan, Singapura, Uzbekistan, dan Zimbabwe.

CATATAN METODOLOGI INDONESIA

SCORE

RANK

Political Risk Service

Korupsi dalam sistem politik. Korupsi dalam bentuk patronase, nepotisme, pendanaan partai secara rahasia, dan hubungan dekat antara politik dan bisnis.

IMD Business School World Competitiveness Yearbook

Suap dan Korupsi: Ada atau tidak ada?

Global Insight Country Risk Ratings

Risiko penyuapan dalam impor/ekspor, memperoleh kontrak publik, dan melakukan kegiatan bisnis lainnya

World Economic Forum Executive Opinion Survey:

Melakukan pembayaran tambahan atau suap yang tidak tercatat

Bertelsmann Stiftung Transformation Index

Pencegahan korupsi dan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi.

Economist Intelligence Unit Country Risk Service

Prosedur dan akuntabilitas yang jelas, penyalahgunaan sumberdaya publik oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau partai politik

Political and Economic Risk Consultancy

Korupsi sebagai masalah di negara tempat beroperasi/bekerja

Varieties of Democracy Project

Korupsi politik yang melibatkan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif

World Justice Project Rule of Law Index

Penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi di cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta di militer dan kepolisian.

TEMA CPI 2024

▶ Global:

▶ **KORUPSI DAN KRISIS IKLIM**

▶ Indonesia:

▶ **KORUPSI, DEMOKRASI DAN
KRISIS LINGKUNGAN**

2016: Social inequality and populism

2017: Shrinking civic space

2018: The crisis of democracy

2019: Building political integrity

2020: COVID-19 crisis response

2021: Human rights and democracy

2022: Conflict, peace and security

2023: Corruption and injustice

TEMUAN CPI 2024

GLOBAL

43

ASIA PACIFIC

44

The Fact is

43

Average in
9 years

56%

Country
Below 43

120 from 180

180
Countries

Surveyed
country

TOP 10 CPI 2024

90 Denmark

88 Finland

84 Singapore

83 New Zealand

81 Luxembourg

81 Norway

81 Switzerland

80 Sweden

78 Netherlands

77 Australia

77 Iceland

77 Ireland

BOTTOM 10 CPI 2024

| | | | |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|
| 8 | South Sudan | 13 | Equatorial Guinea |
| 9 | Somalia | 13 | Eritrea |
| 10 | Venezuela | 14 | Nicaragua |
| 12 | Syria | 15 | North Korea |
| 13 | Libya | 15 | Sudan |
| 13 | Yemen | | |

28 TAHUN CPI INDONESIA



CPI INDONESIA 2024

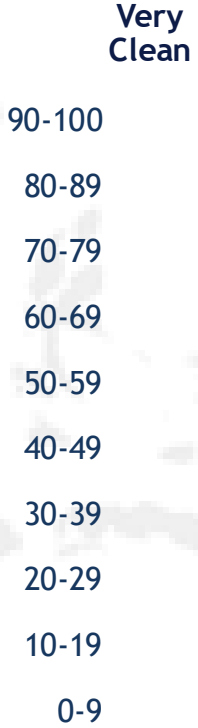


INDONESIA

Score



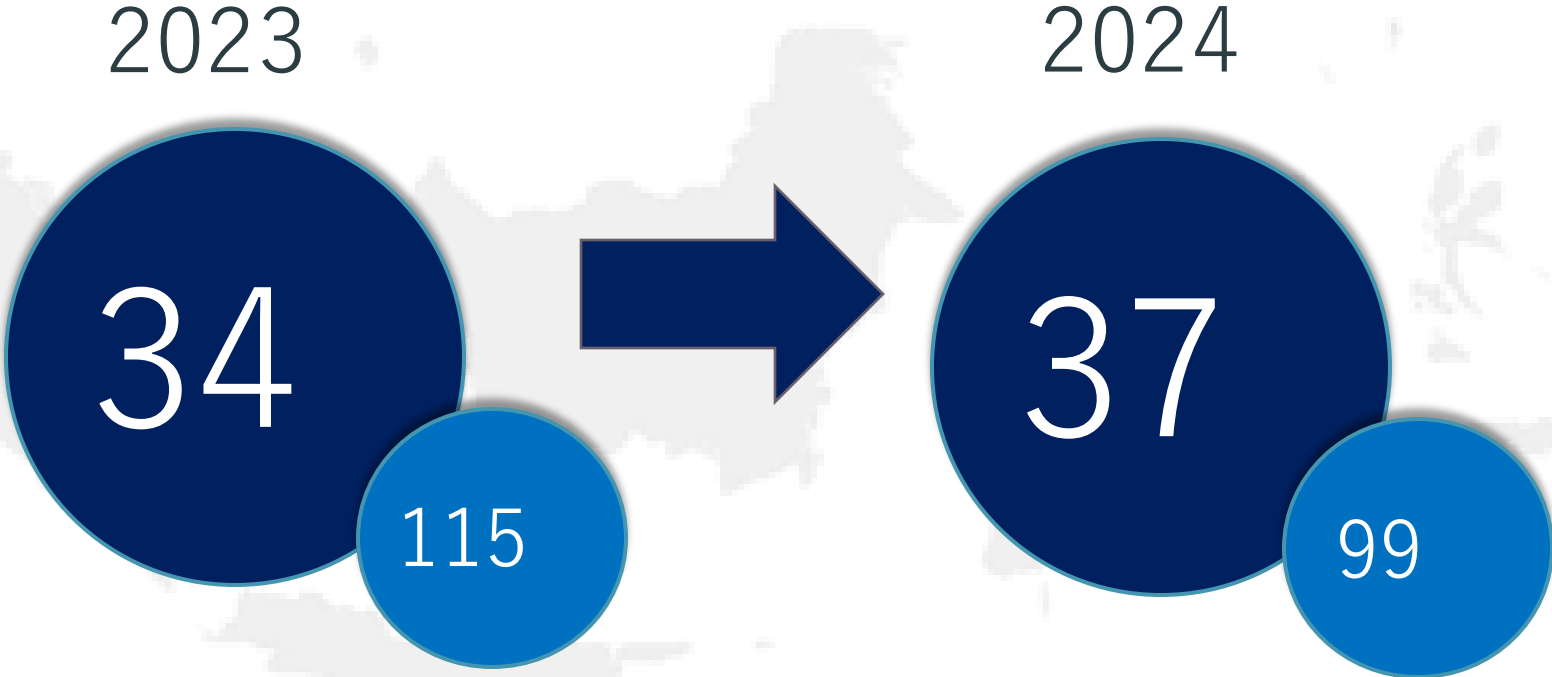
Rank



Highly Corrupt

No Data

CPI INDONESIA 2024



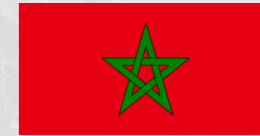
CPI 2024: SKOR SAMA

2024

37

99

Indonesia



Maroko

Argentina



Lesotho

Ethiopia

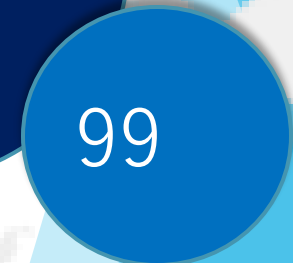


CPI 2024: ASEAN

| Rank | CPI 2024 | Country | CPI 2023 | |
|------|----------|---|----------|---|
| 3 | 84 |  Singapore | 83 | ↑ |
| 57 | 50 |  Malaysia | 50 | ↔ |
| 73 | 44 |  Timor Leste | 43 | ↑ |
| 88 | 40 |  Vietnam | 41 | ↓ |
| 99 | 37 |  Indonesia | 34 | ↑ |
| 107 | 34 |  Thailand | 35 | ↓ |
| 114 | 33 |  Laos | 28 | ↑ |
| 114 | 33 |  Philippines | 34 | ↓ |
| 158 | 21 |  Cambodia | 22 | ↓ |
| 168 | 16 |  Myanmar | 20 | ↓ |

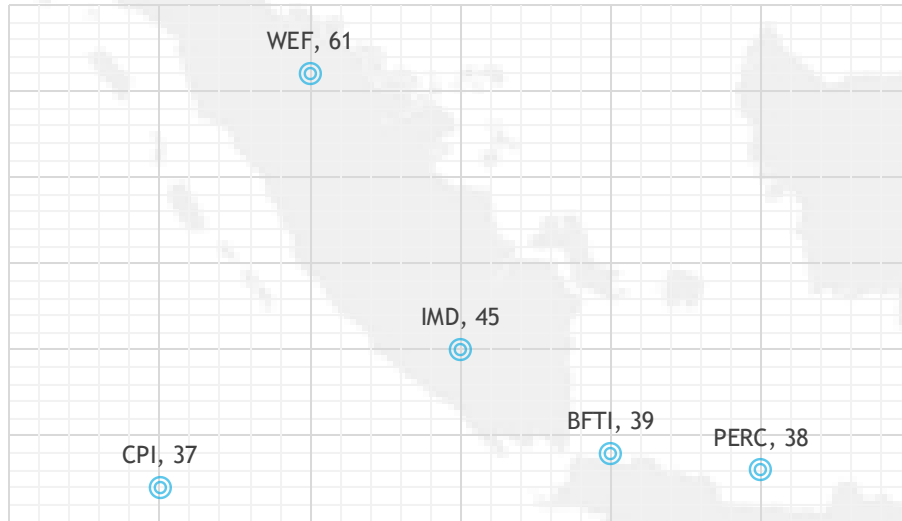
CPI 2024: INDONESIA

| | 2023 | | 2024 |
|---|------|---|------|
| World Economic Forum EOS | | | 61 |
| IMD World Competitiveness Yearbook | 40 | ↑ | 45 |
| Bertelsmann Foundation Transform Index | 37 | ↑ | 39 |
| PERC Asia Risk Guide | 28 | ↑ | 38 |
| Economist Intelligence Unit Country Ratings | 37 | ↓ | 35 |
| PRS International Country Risk Guide | 32 | ↑ | 33 |
| Global Insight Country Risk Ratings | 47 | ↓ | 32 |
| World Justice Project - Rule of Law Index | 24 | ↑ | 26 |
| Varieties of Democracy Project | 25 | ↓ | 22 |



CPI INDONESIA 2024

Perbandingan CPI dengan WEF, IMD, BFTI dan PERC:



- WEF - EOS 2024 adalah indikator yang pada tahun 2022 dan 2023 absen, dan pada 2024 hadir Kembali dengan angka yang sangat signifikan, bahkan jauh meningkat jika dibanding pada tahun 2012-2021. WEF - EOS adalah indikator yang mengukur tentang seberapa wajar bagi perusahaan untuk melakukan pembayaran tambahan atau suap yang tidak tercatat terkait impor-ekspor, utilitas public, pembayaran pajak tahunan, pemberian kontrak dan lisensi public, serta memperoleh keputusan pengadilan yang menguntungkan. Dengan skala asli 1-7, di mana 1 sangat biasa dan 7 tidak pernah.
- IMD 2024 adalah indikator yang mengukur daya saing negara-negara dan, dalam melakukannya, memberikan peringkat dan memeriksa bagaimana iklim sosial-politik dan ekonomi suatu negara memengaruhi daya saing perusahaan. Responden survei ditanya: “Penyuapan dan korupsi: Ada atau tidak ada”. Jawaban diberikan skala 0 hingga 10 di mana 0 adalah tingkat korupsi yang dirasakan tertinggi dan 10 adalah yang terendah.
- Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2024 menyediakan kerangka kerja untuk pertukaran praktik baik di antara para praktisi. Para ahli diminta untuk menilai: (1) Sejauh mana pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan mereka dituntut atau diberi sanksi; dan (2) Sejauh mana pemerintah berhasil membendung korupsi. Skor diberikan pada skala 1-10, dengan 10 sebagai tingkat korupsi terendah dan 1 sebagai tertinggi.
- PERC 2024 mensurvei 16 negara/wilayah Asia Pasifik, ditambah Amerika Serikat, antara Januari dan Maret 2023. Dengan pertanyaan: “Bagaimana Anda menilai masalah korupsi di negara tempat Anda bekerja?”. Jawaban diberi skala dari 0 (bukan masalah) hingga 10 (masalah serius). Hasilnya didasarkan pada 1.873 tanggapan terhadap survei, dengan setidaknya 100 tanggapan per negara kecuali Kamboja (93). Semua responden adalah eksekutif tingkat menengah atau senior dari perusahaan atau profesional di negara yang mereka evaluasi.

CPI INDONESIA 2024

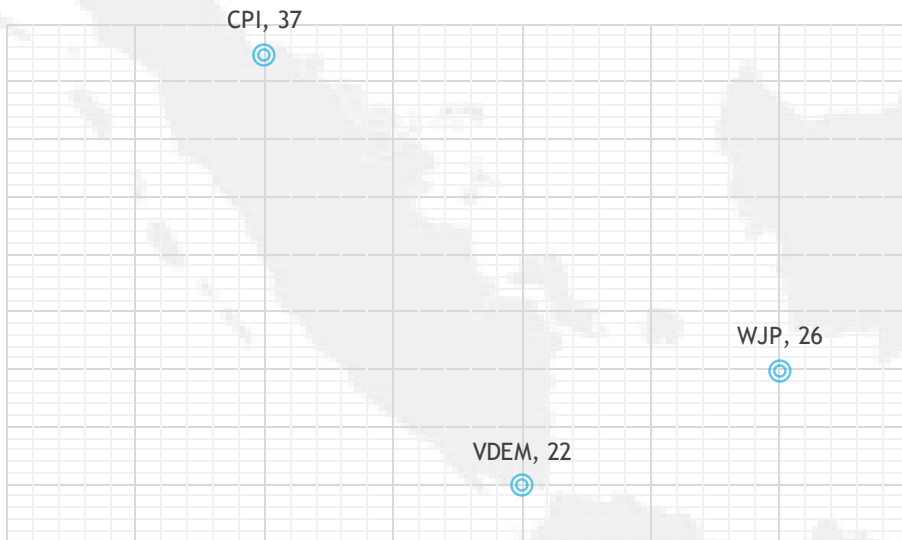
Perbandingan CPI dengan EIU, PRS, GI:



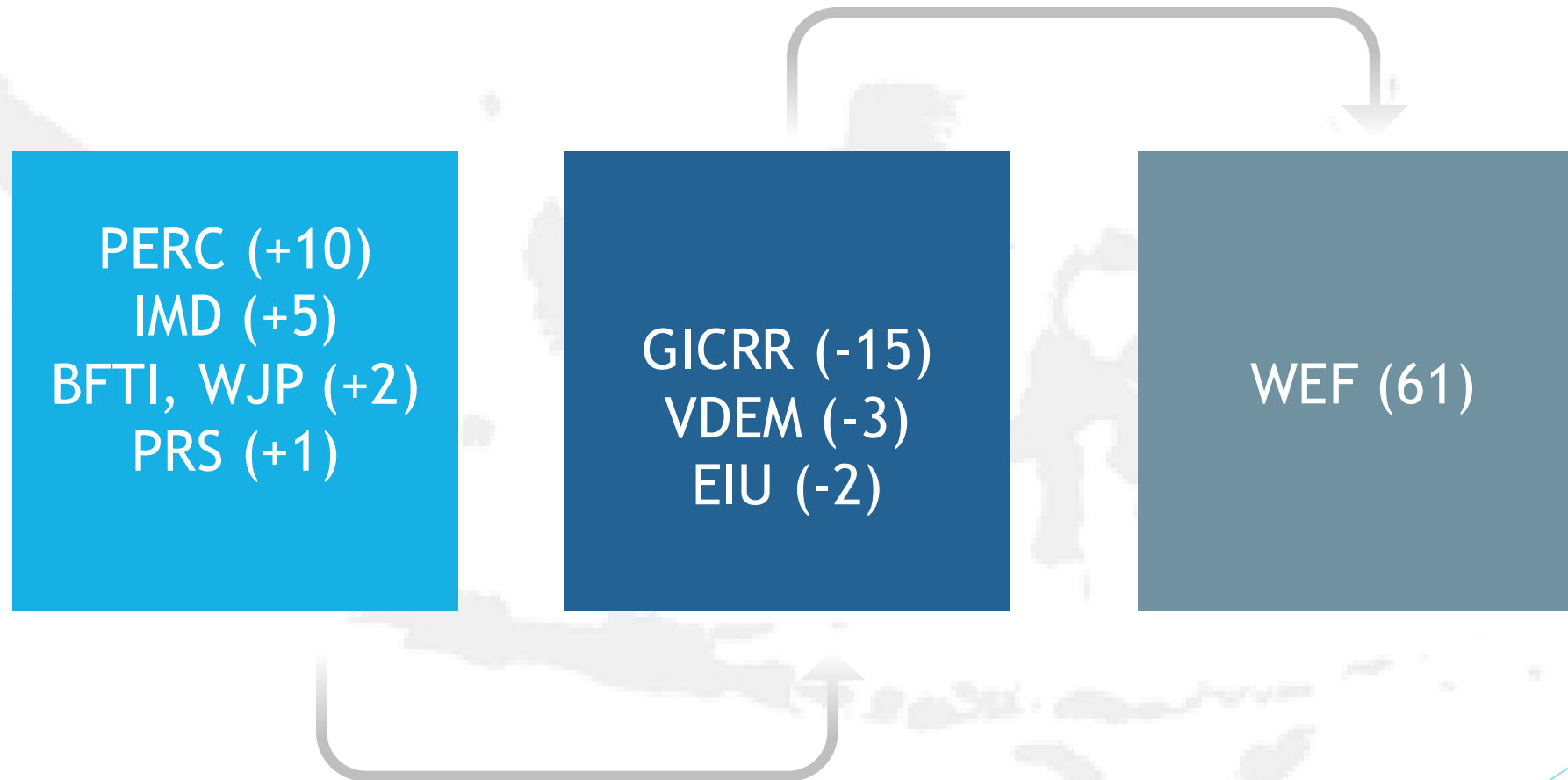
- EIU Country Risk Ratings 2024 memberikan analisis tentang risiko paparan keuangan di lebih dari 140 negara. Pertanyaan meliputi: prosedur dan akuntabilitas yang jelas yang mengatur alokasi dan penggunaan dana public; penyalahgunaan dana publik pejabat publik untuk tujuan pribadi atau partai politik; dana khusus yang tidak ada akuntabilitasnya; badan independen yang mengaudit pengelolaan keuangan public; peradilan independen yang berwenang mengadili pejabat publik atas penyalahgunaan; tradisi pembayaran suap untuk mengamankan kontrak dan mendapatkan keuntungan. Skor diberikan pada skala dari 0 (insiden korupsi sangat rendah) hingga 4 (insiden korupsi sangat tinggi).
- PRS-ICRG 2024 mengukur tingkat risiko politik, ekonomi, dan keuangan setiao negara/wilayah. PRS-ICRG memantau 140 negara/wilayah. PRS-ICRG menilai korupsi dalam sistem politik. Bentuk korupsi yang paling umum dihadapi secara langsung oleh bisnis adalah korupsi keuangan dalam bentuk tuntutan pembayaran khusus dan suap yang terkait dengan lisensi impor dan ekspor, kontrol valuta asing, penilaian pajak, perlindungan polis, atau pinjaman. Ukuran tersebut paling berkaitan dengan korupsi aktual atau potensial dalam bentuk patronase yang berlebihan, nepotisme, reservasi pekerjaan, pendanaan partai secara rahasia, dan hubungan dekat yang mencurigakan antara politik dan bisnis. Skala 0 (risiko potensial tertinggi) hingga 6 (risiko potensial terendah). PRS-ICRG terus menurun dalam 10 tahun terakhir.
- Global Insights 2023 mensurvei 209 negara/wilayah di seluruh dunia. Peringkat tersebut menilai berbagai macam korupsi, mulai dari suap kecil-kecilan hingga korupsi politik tingkat tinggi. Para pakar diminta untuk menilai risiko bahwa individu/perusahaan akan menghadapi suap atau praktik korupsi lainnya untuk menjalankan bisnis, mulai dari mengamankan kontrak besar hingga diizinkan untuk mengimpor/mengekspor produk kecil atau memperoleh dokumen sehari-hari. Hal ini mengancam kemampuan perusahaan untuk beroperasi di suatu negara atau membukanya terhadap sanksi hukum atau peraturan dan kerusakan reputasi. Peringkat tersebut berkisar dari minimum 1,0 (korupsi maksimum) hingga 5,0 (korupsi minimum) dan memungkinkan skor menengah setengah poin.

Perbandingan CPI dengan WJP dan EIU:

- WJP-ROL 2024 mensurvei 142 negara. ROL adalah alat penilaian yang menggambarkan terperinci dan komprehensif tentang sejauh mana negara/wilayah mematuhi dan mempraktikkan aturan hukum. Dengan pertanyaan seputar pejabat pemerintah di cabang eksekutif, legislative, yudikatif, kepolisian dan militer tidak menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Skor diberikan pada skala berkelanjutan dari yang terendah 0 hingga tertinggi 1. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir WJP-ROL meningkat namun secara akumulatif peningkatannya tidak signifikan dan masih tetap di bawah rerata CPI di tiap tahunnya.
- V-Dem 2023 menilai 179 negara dalam pembaruan tahun 2023. Data mencakup periode Januari hingga Desember 2023. Pertanyaan: Seberapa luas korupsi politik? Arah indeks korupsi V-Dem berkisar dari yang kurang korup hingga yang lebih korup. Indeks korupsi mencakup ukuran enam jenis korupsi berbeda yang mencakup berbagai bidang dan tingkat ranah politik, yang membedakan antara korupsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam ranah eksekutif, ukuran tersebut juga membedakan antara korupsi yang sebagian besar berkaitan dengan penyuapan, dan korupsi karena penggelapan. Mereka membedakan antara korupsi di eselon tertinggi eksekutif (di tingkat penguasa/kabinet) dan di sektor publik pada umumnya. Dengan demikian, ukuran tersebut memanfaatkan beberapa jenis korupsi yang dapat dibedakan: baik yang kecil maupun yang besar; baik penyuapan maupun pencurian; baik korupsi yang bertujuan memengaruhi pembuatan undang-undang maupun yang memengaruhi implementasi. Skor diberikan pada skala berkelanjutan dari 0 (tingkat korupsi terendah) hingga 1 (tingkat korupsi tertinggi). V-Dem juga merupakan sebuah indeks yang mengalami kemerosotan dalam beberapa tahun terakhir dan selalu berada di bawah rerata CPI tiap tahunnya.



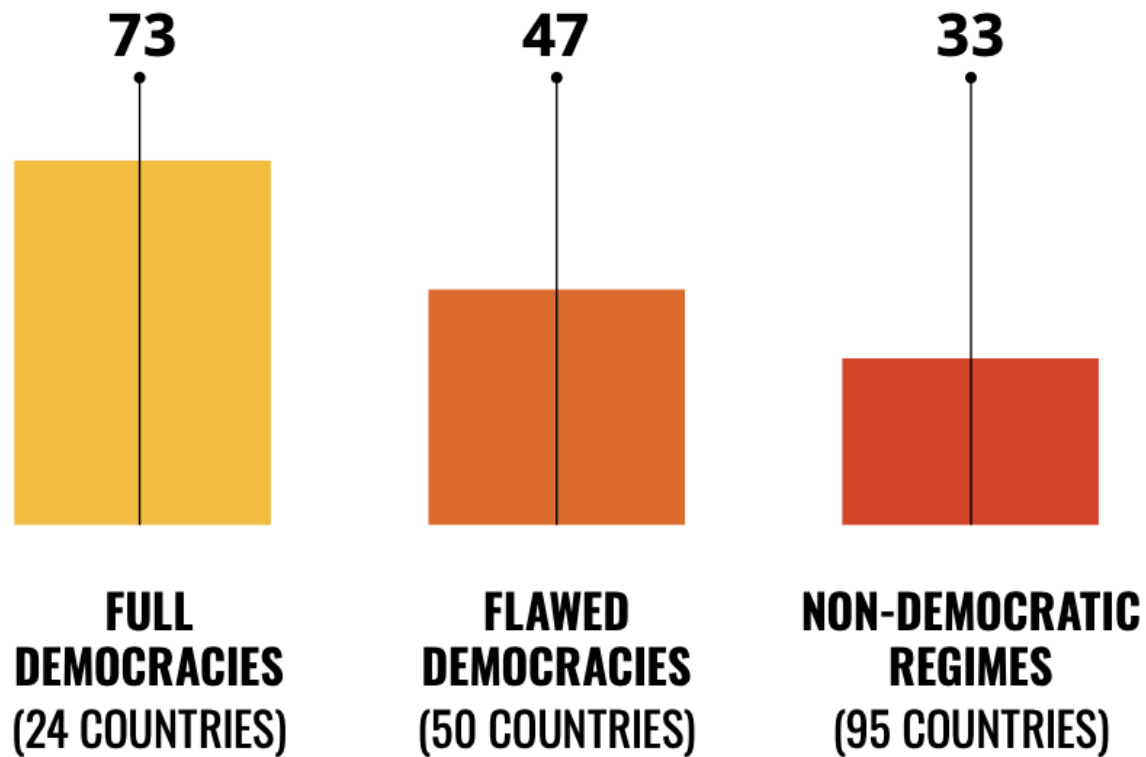
CPI INDONESIA 2024



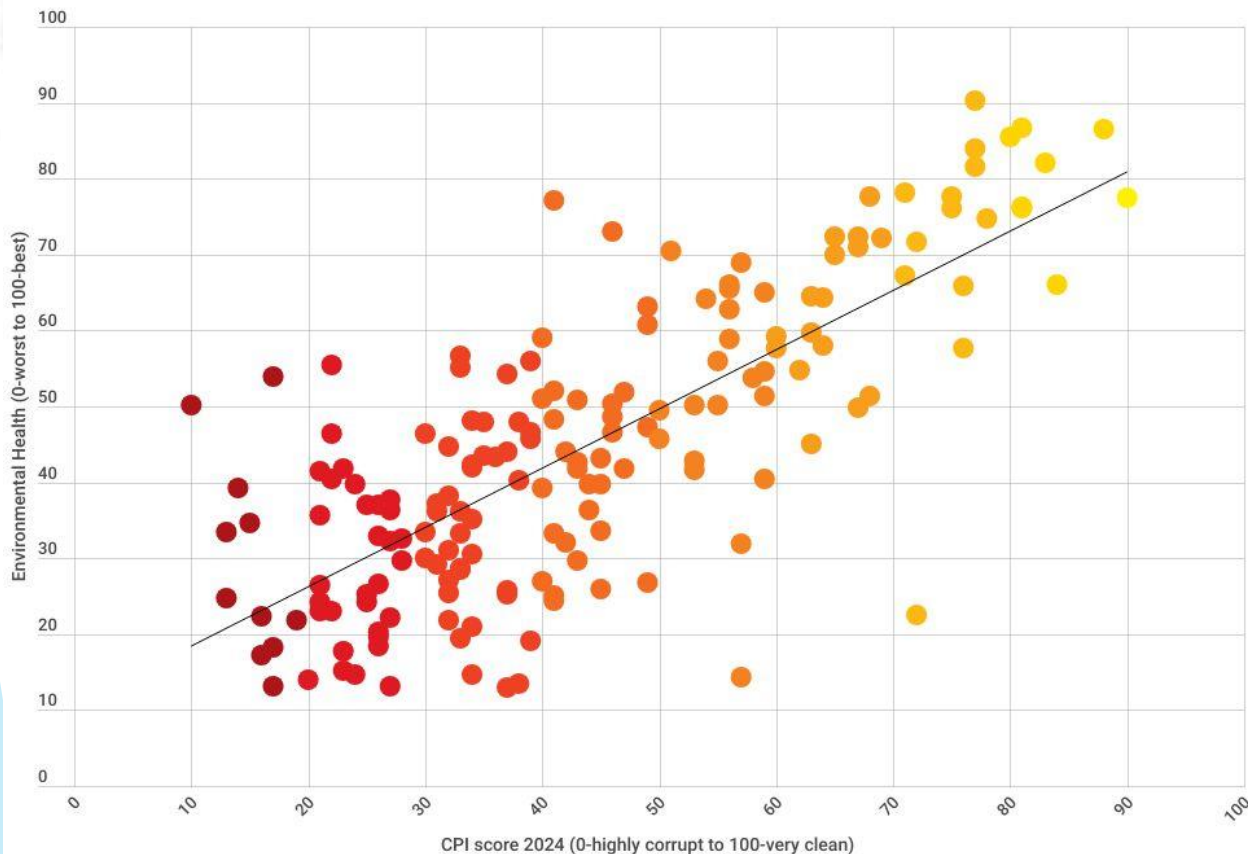
KORUPSI DAN DEMOKRASI

AVERAGE CPI 2024 SCORE FOR DIFFERENT TYPES OF GOVERNMENT*

Strong democracies vastly outperform flawed ones and authoritarian regimes in control of corruption.



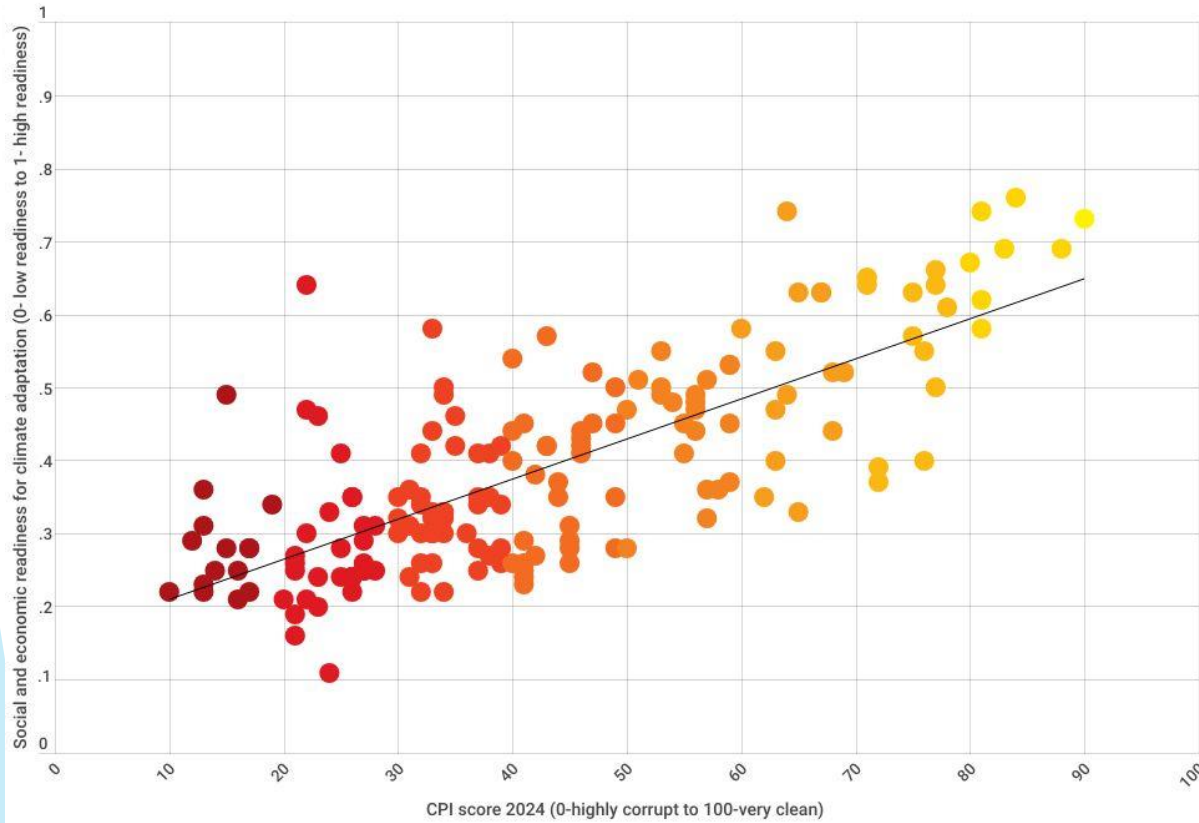
KORUPSI DAN KRISIS LINGKUNGAN



Korupsi menghambat kebijakan dan tata kelola iklim yang efektif, merusak lingkungan, dan melestarikan praktik ekonomi dan bisnis yang merugikan. Meskipun perlindungan lingkungan merupakan fenomena yang memiliki banyak sisi, tidak mengherankan bahwa negara-negara dengan skor CPI yang lebih baik cenderung berkinerja lebih baik dalam melestarikan lingkungan yang sehat menurut data dari Indeks Kinerja Lingkungan.

Setiap tahun, swasta dan pemerintah menghabiskan lebih dari satu triliun dolar untuk pendanaan iklim global, tetapi ini hanya sebagian kecil dari apa yang diperkirakan PBB diperlukan untuk mengurangi dan beradaptasi dengan krisis iklim. Namun, dana ini tetap sangat rentan terhadap korupsi, yang menguras sumber daya yang dimaksudkan untuk mengurangi emisi dan melindungi masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim. Ketika korupsi merajalela, aksi mendukung perubahan iklim sering kali gagal, dan korupsi hanyalah salah satu alasannya.

KORUPSI DAN KRISIS LINGKUNGAN



Menurut *Climate Policy Initiative*, sekitar 40% dari pendanaan iklim diarahkan ke sektor energi melalui inisiatif seperti *Kemitraan Transisi Energi yang Adil*, transisi energi bersih dapat terancam jika pelaku korupsi mengalihkan dana ini untuk keuntungan pribadi. Mengatasi tantangan tata kelola memperkuat ketentuan transparansi dan antikorupsi dalam dana iklim sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya ini mencapai tujuan yang diinginkan dan mendorong kemajuan yang berarti dan adil dalam memerangi perubahan iklim.

Perlunya langkah-langkah antikorupsi yang lebih kuat dalam pendanaan iklim karena kontrol korupsi dan persyaratan transparansi sering kali tidak memadai dan tidak terkoordinasi dengan baik. Meskipun pasal 13 Perjanjian Paris menekankan pentingnya transparansi dalam aksi iklim, pasal tersebut masih samar-samar dalam perumusannya tentang bagaimana hal ini harus dilakukan dalam praktik. Akibatnya, mekanisme yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan iklim masih terfragmentasi dan sebagian besar bersifat sukarela, yang menciptakan lahan subur bagi korupsi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang lebih terpadu untuk melindungi dana ini dari korupsi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



URGENSI TATA KELOLA EKONOMI DAN BISNIS YANG BERINTEGRITAS.

Meskipun indikator pengelolaan ekonomi, bisnis dan investasi secara makro nampak menjanjikan, namun terkoreksi secara signifikan bahwa praktik korupsi, baik suap dan korupsi antara pemegang otoritas kebijakan dengan pelaku usaha masih marak terjadi. Sehingga dalam hal ini Pemerintah perlu untuk membuat kerangka regulasi dalam kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemberantasan korupsi dan mulai menyentuh pada kolusi dan nepotisme yang terbukti belum terdapat kebijakan pengendalian konflik kepentingan yang memadai. Sehingga upaya pemberantasan korupsi bukan hanya dimaksudkan untuk mempermudah investasi dan pertumbuhan ekonomi belaka. Tetapi juga penegakan hukum dan demokrasi.



MENGEMBALIKAN INDEPENDENSI DAN KEWENANGAN OTORITAS LEMBAGA PENGAWAS KEKUASAAN.

Melihat upaya penegakan hukum yang selalu menjadi faktor «pemberat» dalam korupsi, maka badan peradilan dan badan pengawasan seperti lembaga antikorupsi dan lembaga pemeriksa/pengawas harus kembali mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun, memiliki sumber daya yang baik, dan diberdayakan untuk mendeteksi dan memberikan hukuman atas pelanggaran. Pemerintah, parlemen dan pengadilan sebagai fungsi pengawas dan penyeimbang kekuasaan juga harus melakukan tugasnya secara berkeadilan, memberikan kepastian hukum dan mandiri.



MERAWAT DEMOKRASI DAN MENJAGA KEBEBASAN SIPIL

Maraknya korupsi politik menjadikan skor CPI selalu berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Peningkatan skor dalam skala 1 s.d 5 per seratus per tahun tidaklah signifikan. Pemerintah dan parlemen perlu terus menjaga partisipasi public di berbagai sector dengan menjaga kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan akademik dan jaminan menjaga ruang sipil yang aman bagi tumbuhnya demokrasi yang adil. Sebab jelas sekali bahwa demokrasi yang substansial adalah prasyarat bagi pemberantasan korupsi yang terarah dan berdampak.



Wawan Suyatmiko
Transparency International Indonesia
2025